

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Pemantauan harga komoditas pangan seperti beras, gula, minyak goreng, daging ayam, daging sapi, telur, cabai, bawang, sayuran, bahan bakar (Gas Elpiji), dan cenderung stabil. Saat komoditas tersebut mengalami peningkatan harga yang berarti kurangnya pasokan yang menyebabkan stock kurang. Adapun perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting yang stabil harganya di tw II ini yaitu komoditi seperti beras lokal maupun beras premium, minyak goreng, telur ayam, bawang merah dan bawang putih. sedangkan yang mengalami kenaikan harga yaitu komoditi seperti ayam broiler dan daging sapi dikarenakan menjelang hari raya idul fitri. sedangkan komoditi yang mengalami penurunan harga yaitu ikan kembong, cabe rawit dan gula pasir, dimana cabe rawit stocknya melimpah karena adanya panen raya dan gula pasir stock untuk kedepan nya sudah aman terkendali.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Dari beberapa sector yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kubu Raya ada beberapa sector yang harus di perhatikan yaitu: Pertanian, kehutanan dan perikanan. Akibat cuaca yang tidak menentu yang diimbangi dengan hujan sehingga beberapa lahan pertanian terkena banjir yang mengakibatkan Luas panen padi sawah berkurang sekitar 3 % sekitar 6000 Ha (Data dinas Pertanian) yang menyebabkan sector ini diperkirakan tumbuh sekitar 12% (karena menjadi negatif sekitar 3%). Penjelasan : terjadinya penurunan luas panen dari 39.017,38 Ha di tahun 2019 menjadi 32.946,20 Ha di tahun 2020 (Turun 6.071,18 Ha atau (-15,56 %) dengan share total 13,05%. Permintaan menunjukkan sinyal pemulihan seiring dengan pelonggaran aturan PPKM yang dilakukan secara gradual, meskipun masih terbatas Peningkatan mobilitas didorong oleh pelonggaran aturan PPKM yang dilakukan. Sejumlah relaksasi berupa pembukaan terbatas pasar rakyat, pedagang kaki lima (PKL), toko kelontong, barbershop, pedagang kecil, rumah makan, warteg, dan lapak jajanan berdampak terhadap kenaikan belanja masyarakat. Kebijakan yang dikeluarkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2021 salah satunya berdampak menurunnya pengguna jasa transportasi penerbangan yang pertumbuhan terhadap ekonomi Kubu Raya menurun pada sektor tersebut. Penurunan pertumbuhan lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum juga menjadi penyebab yang mempengaruhi konstruksi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kubu Raya .

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dalam rangka menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok pada periode hari besar keagamaan nasional (hbkn) puasa dan lebaran 2021/1442 H diperlukan langkah-langkah adalah sebagai berikut : 1. Memantau harga dan pasokan barang kebutuhan pokok (bapok) di pasar-pasar secara intensif untukantisipasi adanya potensi kenaikan harga. 2. Mengidentifikasi kecukupan stok dan ketahanan bapok di pelaku usaha distribusi, serta berkoordinasi tpid provinsi untuk kondisi kecukupan untuk mencegah aksi - aksi spekulasi 3. Melakukan koordinasi intensif dengan tim provinsi, bulog dan asosiasi perunggasan serta pihak terkait sesuai kebutuhan jika terjadi gejolak harga atau indikasi potensi kekurangan pasokan 4. Menyiapkan jalur / rantai distribusi alternatif bila terjadi gangguan distribusi yang mengakibatkan gejolak harga 5. Mengawal kelancaran distribusi beras bulog dalam program ketersediaan pasokan dan stabilitas harga (kpsb) beras medium di pasar-pasar rakyat pada wilayah

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Bahwa Kabupaten Kubu Raya merupakan daerah produsen yang memproduksi hasil-hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan yang sebagian besar didistribusikan ke kota Pontianak. Namun masih mengalami gejolak harga yang tinggi di komoditi pangan tertentu. Perlunya penguatan dan sinergitas dalam mengelola potensi pertanian, peternakan, perdagangan, dan perikanan dalam upaya penguatan ekonomi di masyarakat dengan menerapkan sistem "kepong bakol" (gotong royong) dalam menjalankan perbaikan ekonomi.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Rumusan rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi daerah Kabupaten Kubu Raya : 1. Ketersediaan Pasokan □ OPD teknis melakukan pendataan dan penyusunan data terkait bidang pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, ketahanan pangan termasuk ketersediaan atau stock pangan, sistem distribusi serta hal-hal lain yang berhubungan dengan inflasi (Harga sembako, BBM dan LPG) □ Secara kontinyu melakukan pemantauan harga kebutuhan pokok masyarakat dan stock ketersediaan pangan, dalam rangka memonitor indikasi kelangkaan barang sehingga dapat dilakukan langkah-langkah antisipasi dan intervensi dengan efektif. 2. Kelancaran Distribusi □ Meningkatkan program ketahanan pangan di daerah dan menjaga kelancaran arus distribusi barang. □ Melakukan pengawasan secara rutin ke Gudang Distributor Bahan Pangan untuk memastikan stock aman. 3. Keterjangkauan Harga Melakukan monitoring dan pendataan harga barang dan jasa serta melaporkannya secara berkala dan berjenjang. 4. Komunikasi Efektif □ Melakukan pendataan dan penyusunan program dan kegiatan OPD yang mendukung pengendalian inflasi daerah. □ Melakukan koordinasi dan menyusun jadwal pelaksanaan operasi pasar murah bazar guna menstabilkan harga barang terutama saat menjelang hari raya keagamaan. □ Tim Pengendalian Inflasi Daerah melakukan Capacity Building (Study Banding) kepada Kabupaten/Kota yang telah berhasil dalam upaya mengendalikan inflasi dan peningkatan kapasitas (sosialisasi/Rapat Koordinasi) dalam rangka koordinasi pengendalian inflasi sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia □ Melaksanakan kegiatan stabilitas harga dengan terus berkoordinasi antar instansi perangkat daerah yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah. □ Melaksanakan rapat koordinasi dengan OPD terkait mengenai perkembangan harga bahan pokok, ketersediaan stok, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif menjelang hari raya, rutin walaupun tidak saat hari raya dan apabila dipandang perlu mengambil kebijakan berupa operasi pasar / pasar murah.